Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub judul Penelitian Terdahulu, peneliti mencantumkan dua materi penelitian terdahulu yang mengkaji objektivitas pemberitaan di media daring. Literatur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan adanya kesamaan topik (mengenai objektivitas pemberitaan oleh media) dan metode penelitian (analisis isi kuantitatif). Peneliti terinspirasi mengkaji topik tersebut dengan mengajukan judul penelitian yang berbeda yang disesuaikan dengan konteks tahun 2014 yang teraktual.

Penelitian mengenai objektivitas pemberitaan di media massa telah dilakukan oleh Grace Natali, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara, pada 2011. Penelitian tersebut tertuang dalam skripsinya yang berjudul "Objektivitas Pemberitaan Kasus Video Porno Mirip Artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari (Studi Deskriptif Kuantitatif Analisis Isi Tentang Objektivitas Pemberitaan Kasus Video Porno Mirip Artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari di Tabloid Cek & Ricek Periode 615-625)". Penelitian ini menggunakan paradigma positivis dalam melihat fenomena yang terjadi.

Penelitian analisis isi kuantitatif ini menggunakan objek penelitian berupa teks berita tabloid Cek & Ricek mengenai kasus video porno mirip artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari periode 615 tahun XII (Rabu, 31 Maret – 6 April 2010)

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

– periode 625 tahun XII (Rabu, 21 – 27 Juli 2010). Guna mengukur seberapa besar tingkat objektivitas tabloid Cek & Ricek tersebut, Natali mengelompokkan unit analisisnya ke dalam beberapa kategori, yakni fakta, pencantuman waktu terjadinya peristiwa, atribusi, relevansi berita (*news value*), *cover both sides*, ukuran fisik kolom (cmk), ada tidaknya pencampuran fakta dan opini, isi dan judul sesuai, dan dramatisasi.

Hasil penelitian Natali menunjukkan bahwa tabloid Cek & Ricek menggunakan fakta secara variatif, baik fakta sosiologis (43,2%) maupun fakta psikologis (48,7%). Berdasarkan kategori pencantuman waktu, semua berita mencantumkan tanggal atau kata-kata yang mengindikasikan tentang waktu. Akan tetapi, dilihat dari kategori atribusi, baru 73% berita di tabloid infotainment tersebut yang mencantumkan sumber berita secara jelas. Meski keseluruhan berita terkait kasus video porno mirip ketiga artis tersebut memiliki unsur relevansi yang tinggi, hanya 58,5% berita yang menerapkan prinsip cover both sides. Hal ini juga terlihat dari ketidakseimbangan luas kolom yang diberikan bagi pihak-pihak yang tersangkut dalam kasus untuk memberikan komentar. Netralitas dalam pemberitaan kasus tersebut juga cenderung diabaikan. Dengan demikian, Natali menyimpulkan, tabloid Cek & Ricek tersebut tidak objektif dalam memberitakan kasus video porno mirip artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Hal ini dikarenakan hanya terpenuhinya prinsip akurasi dan relevansi berita, sedangkan prinsip ketidakberpihakan diabaikan.

Perbedaan penelitian Natali dengan penelitian yang peneliti lakukan utamanya terletak pada perbedaan objek penelitian. Natali memilih tabloid

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

infotainment sebagai objek penelitian. Berbeda halnya dengan Natali, peneliti memilih artikel berita politik dan metropolitan terkait Ahok pada media berita daring berideologi Islam.

Selanjutnya, penelitian mengenai topik objektivitas pemberitaan di media massa juga dilakukan oleh Laras P. S., mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, pada 2001. Penelitian tersebut berjudul "Objektivitas Majalah Islam dalam Pemberitaan Konflik SARA (Kasus Pemberitaan Majalah Sabili dalam Konflik Ambon, Sampit, dan Poso)".

Penelitian ini mengkaji objek penelitan berupa artikel berita dari beberapa edisi Majalah Islam Sabili pada 10 Maret 1999, 24 Maret 1999, 21 April 1999, 25 Agustus 1999, 14 Maret 2001, 28 Maret 2001, dan 18 Juli 2001. Tujuannya untuk mengetahui objektivitas Majalah Sabili sebagai media Islam beroplah besar dalam memberitakan kerusuhan yang berbau konflik SARA dan menemukan pengaruh situasi politik dan ekonomi negara terhadap objektivitas suatu teks.

Dalam penelitian ini, Laras menggunakan *mixed methods analysis*. Dengan penelitian ini, Laras melakukan tiga jenjang analisis. Pada jenjang pertama yakni teks, Laras menganalisis objek penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif dengan menggunakan teori Westerstahl. Berangkat dari teori Westerstahl, Laras mengelompokkan unit analisisnya ke dalam empat kategori, yaitu relevansi, kebenaran, keseimbangan , dan netralitas. Selanjutnya, pada jenjang *discourse practice,* Laras melakukan wawancara mendalam. Dan pada tahap *sosiocultural practice,* Laras juga melakukan studi literatur.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Hasil penelitian Laras menunjukkan bahwa Majalah Sabili belum objektif, tercermin dari teks Sabili yang banyak melakukan pelanggaran terhadap komponen utama konsep objektivitas Westerstahl. Selanjutnya, Laras juga menyimpulkan bahwa Sabili menjadikan konflik berbau SARA sebagai suatu komoditas untuk meningkatkan oplah majalah tersebut. Hal ini terlihat pada judul dan halaman sampul majalah yang cenderung didramatisir. Selain itu, Sabili juga menghadirkan potret umat Islam sebagai pihak yang tertindas.

Perbedaan penelitian Laras dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang terletak pada dua hal. Pertama, objek penelitian. Jika Laras meneliti artikel berita majalah Islam terkait konflik kerusuhan, peneliti memilih artikel berita media daring Islam terkait isu politik. Kedua, paradigma penelitian. Jika Laras menggunakan paradigma kritis, peneliti menggunakan paradigma positivis.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Mahasiswa / NIM	Metode Penelitian	Teori yang dipakai	Kesimpulan	Keterangan
1.	**Objektivitas Pemberitaan Kasus Video Porno Mirip Artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari (Studi Deskriptif Kuantitatif Analisis Isi Tentang Objektivitas Pemberitaan Kasus Video Porno Mirip Artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari di Tabloid Cek & Ricek Periode 615-625)**	Grace Natali / 07120110023	Analisis Isi (Kuantitatif)	Teori tanggung jawab sosial Objektivitas berita Media massa (tabloid; *infotainment* dalam pemberitaan media massa)	Tabloid Cek & Ricek tidak objektif. Tabloid tsb hanya memenuhi prinsip akurasi dan relavansi. Prinsip imparsialitas diabaikan.	Objek penelitian berupa artikel berita dari media massa cetak berupa tabloid *infotainment*.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

2.	**Objektivitas Majalah Islam dalam Pemberitaan Konflik SARA (Kasus Pemberitaan Majalah Sabili dalam Konflik Ambon, Sampit, dan Poso)**	Laras P. S. / 099701024X	*Mixed Method Analysis*	Teori Strukturasi Giddens *Influences on Media Content* Objektivitas Westerstahl Konstruksi Realitas Media Massa	Majalah Sabili belum memenuhi keseluruhan prinsip objektivitas. Sabili juga cenderung menjadikan konflik berbau SARA sebagai suatu komoditas untuk meningkatkan oplah majalah tersebut. Judul dan halaman sampul majalah didramatisir.	Objek penelitian yang dikaji berupa artikel berita dari media cetak, yakni majalah Sabili.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

3.	**Objektivitas Pemberitaan Media Berita Daring Berideologi Islam (Studi Analisis Isi Pemberitaan *VOA-Islam.Com* Terkait Aksi Penolakan Terhadap Ahok)**	Georgene Suryani / 11140110060	Analisis Isi (Kuantitatif)	Teori tanggung jawab sosial Objektivitas berita Westerstahl Media berita daring	-	Objek penelitian berupa artikel berita dari media berita daring VOA Islam terkait protes penolakan terhadap Ahok selama periode September hingga Oktober 2014.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari empat teori normatif pers yang dikemukakan Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm pada 1963. Teori yang mulai berkembang pada abad ke-20 di Amerika Serikat ini muncul sebagai bentuk protes terhadap teori pendahulu yaitu teori libertarian yang mengagungkan kebebasan yang bersifat mutlak. Teori pendahulu tersebut dinilai menjadi penyebab kemerosotan moral pada masyarakat.

Pada dasarnya, teori tanggung jawab sosial dilandasi oleh pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat (Ardianto et al, 2007:161). Sekalipun prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, kebebasan pers tidaklah mutlak. Di bawah teori tanggung jawab sosial, kebebasan pers akan dibatasi oleh nilai moral dan etika. Wartawan dan media tidak bisa bersikap semaunya karena mereka bertanggung jawab penuh kepada masyarakat. Media pun memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang wajib untuk dipenuhi.

Teori tanggung jawab sosial ini sejalan dengan salah satu poin elemen jurnalisme yang disampaikan Kovach dan Rosenstiel (2001) yaitu loyalitas utama seorang jurnalis adalah pada masyarakat. Dengan demikian, media wajib menyuarakan kebenaran, menyampaikan kritik, serta membela kepentingan masyarakat. Sekalipun suatu media dimiliki

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

oleh perorangan, media tersebut wajib mengikuti aturan hukum terkait media yang berlaku.

Menurut Sumadiria (2014:75), teori tanggung jawab sosial bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, melakukan transmisi bisnis, dan terutama untuk mengangkat konflik hingga tingkat diskusi melalui pasar ide yang bebas dan bertanggung jawab.

Theodore Peterson (Sumadiria, 2014:75) memaparkan enam fungsi pers yang berada di dalam teori libertarian pada dasarnya sama dengan fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial. Pertama, melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perbedaan mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kedua, memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga mereka pun dapat mengatur dirinya sendiri. Ketiga, pers menjadi penjaga hak-hak individu dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang bertugas mengawasi pemerintah. Keempat, melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual barang/jasa melalui medium periklanan. Kelima, menyediakan hiburan. Keenam, mengusahakan sendiri biaya finansial sehingga bebas dari tekanan individu-individu yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam praktiknya, media pun akan dikontrol setidaknya oleh tiga hal. Kontrol media yang pertama yaitu pendapat masyarakat (*community opinion*). Kontrol media berikutnya yakni tindakan konsumen (*consument action*). Dan ketiga, etika profesi (*professional ethics*). Kontrol media

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

inilah yang akan menjaga media dan wartawan bekerja secara bebas dan bertanggung jawab. Pers akan sangat berhati-hati untuk tidak memuat tulisan yang melanggar hak-hak pribadi seseorang dan terlebih lagi melanggar kepentingan vital masyarakat.

Mulanya teori ini berkembang di Amerika Serikat. Untuk itu, lembaga yang mengatur regulasi pers yang wajib ditaati media adalah Komisi Kebebasan Pers Amerika. Kala itu, lembaga tersebut mengeluarkan lima syarat yang wajib ditaati oleh media. Syarat itu di antaranya yaitu media dituntut menyajikan laporan kejadian sehari-hari secara mendalam dan cerdas, serta akurat; media harus menjadi forum pertukaran komentar dan kritik; media hendakanya menonjolkan gambaran representatif dari kelompok-kelompok unsur pokok dalam masyarakat; media bertanggung jawab dalam menyajikan dan menguraikan tujuan dan nilai-nilai masyarakat; dan media memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berita setiap hari (Sumadiria,2014:26-27).

Berdasarkan keempat teori sistem pers yang dikemukakan Siebert, Peterson, dan Schramm, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang secara umum menerapkan teori pers tanggung jawab sosial. Secara khusus, Indonesia menerapkan sistem pers Pancasila. Dengan demikian, segala perilaku dan praktik pers di Indonesia haruslah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers menjadi perwujudan norma hukum yang dibentuk guna melindungi kebebasan

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

eksistensial wartawan (Wibowo, 2009:86). Sedangkan pembinaan terhadap pers nasional Indonesia dilakukan oleh Dewan Pers. Pasal 15 ayat 3 UU Pers No 40 Tahun 1999 menjelaskan pihak-pihak yang tergabung di dalam Dewan Pers. Disebutkan bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; pimpinan perusahaan yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Ayat ke-4 dari pasal yang sama juga menyebutkan bahwa ketua dan wakil ketua Dewan Pers akan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers sendiri.

Dewan Pers sebagai lembaga pers yang independen di Indonesia menjalankan fungsinya dalam upaya mengembangkan kebebasan pers dan meningkatkan mutu pers nasional. Beberapa fungsi Dewan Pers sebagaimana dinyatakan dalam Wibowo (2009:99) yakni melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian demi pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam hal menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Sesuai dengan fungsi ketiga Dewan Pers yakni menetapkan dan mengawasi pelaksanaan KEJ oleh pers, maka Dewan Pers menjadi salah

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

satu kontrol media yang ada di Indonesia. Media, khususnya pers, wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang terkandung dalam undang-undang pers dan berbagai keputusan Dewan Pers.

Kode Etik Jurnalistik pasal 1 secara lugas menjelaskan bahwa wartawan Indonesia wajib bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Hal ini mengandung arti bahwa pers wajib memberikan informasi yang berdasarkan fakta dan berimbang. Kedua aspek ini merupakan bagian dari konsep objektivitas.

2.2.2 Objektivitas Berita

Dalam praktik jurnalistik, seorang wartawan wajib memproduksi berita yang berisi informasi berkualitas. Untuk itu, salah satu syarat utama yang perlu dipenuhi media yakni menerapkan prinsip objektivitas dalam berbagai tahapan praktik media. Tahapan tersebut meliputi tahap pengumpulan, pengolahan, sampai penyebaran informasi.

Obyektivitas berarti melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang Anda harapkan semestinya (Ishwara,2011:67). Memperdalam penjelasan itu, Sumadiria (2006:38) mengatakan, obyektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Namun, tidak soal jenis medianya, baik cetak, elektronik, maupun daring, berita yang dihasilkan oleh media haruslah obyektif. Hal ini mengandung arti bahwa berita harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tanpa

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Selanjutnya, Siahaan (2001:100) mendefinisikan objektivitas sebagai penyajian berita yang benar, tidak berpihak, dan berimbang.

Selanjutnya McQuail (2012:222) menjelaskan ciri-ciri dari konsep objektivitas yakni adanya penerapan sikap keterlepasan dan netralitas terhadap objek peliputan; terdapat upaya untuk menghindari keterlibatan (tidak berpihak dalam perselisihan atau menunjukkan bias); serta membutuhkan akurasi, relevansi, dan keutuhan. Berpedoman pada ciri-ciri tersebut, suatu proses peliputan jurnalistik menuntut sikap adil dan tidak diskriminatif terhadap sumber maupun objek pemberitaan.

Untuk mengukur tingkat keseimbangan dan netralitas suatu pemberitaan, seorang peneliti asal Swedia J. Westerstahl mengemukakan sebuah rumusan utama konsep objektivitas. Westerstahl membagi konsep objektivitas menjadi dua, yakni aspek kognititif (kualitas informasi/faktualitas) dan aspek evaluatif (imparsialitas). Konsep Westerstahl terkait objektivitas berita dipaparkan lebih lanjut pada skema berikut ini.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Skema 2.1 Konsep objektivitas pemberitaan Westerstahl (1983)

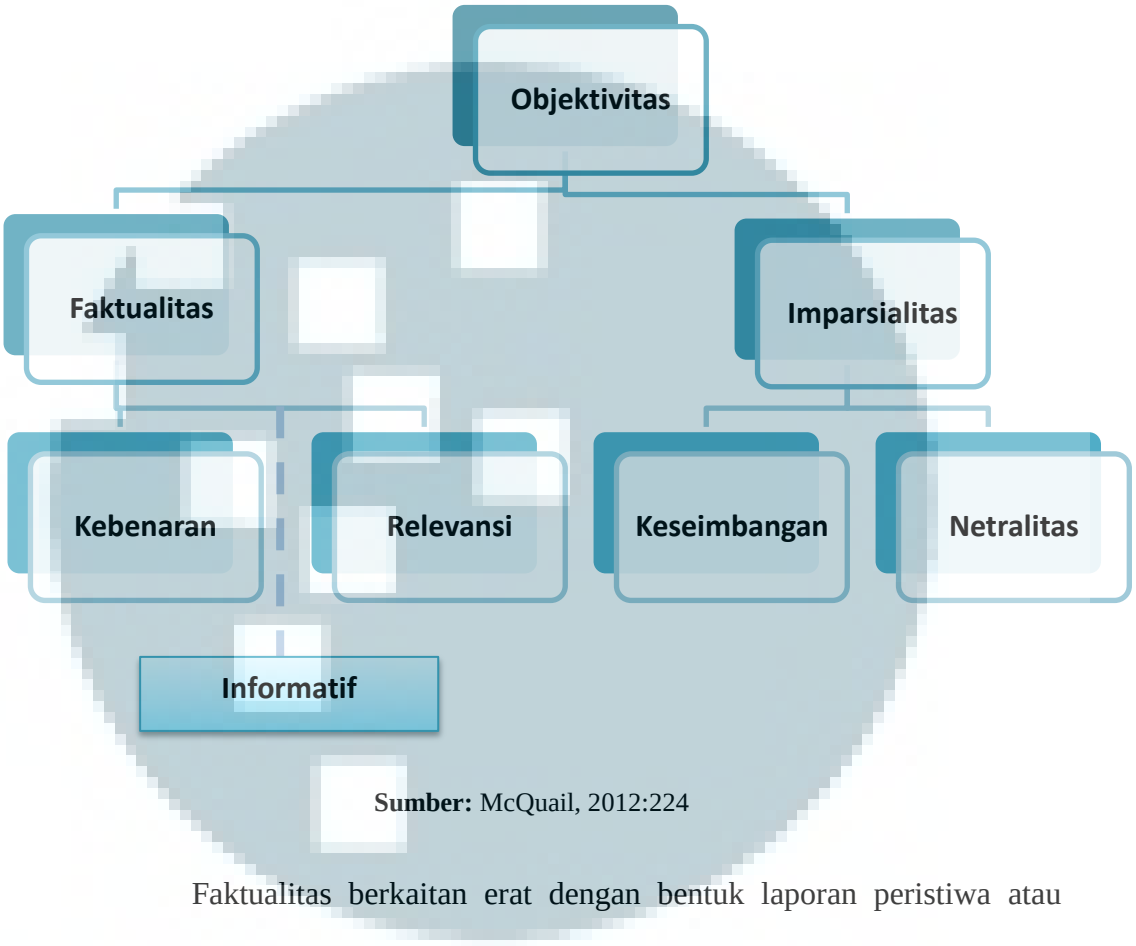

Sumber: McQuail, 2012:224

Faktualitas berkaitan erat dengan bentuk laporan peristiwa atau pernyataan yang sumber dan kebenarannya dapat dipercaya, untuk kemudian disajikan secara bebas dari subyektivitas atau opini wartawan. Faktualitas itu sendiri terdiri atas dua dimensi, yaitu kebenaran dan relevansi.

Kebenaran yang dimaksud yakni keutuhan laporan, akurasi, dan niat untuk tidak menyesatkan atau menyembunyikan hal yang relevan (McQuail, 2012:223). Kebenaran sebuah berita mengacu pada reliabilitas dan kredibilitas sebuah fakta.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Untuk mengukur kebenaran sebuah berita, beberapa kriteria yang perlu diteliti yakni *factualness*, *accuracy*, dan *completeness* (McQuail, 1992:197). *Factualness* dalam arti secara jelas membedakan fakta dari opini, interpretasi, atau komentar, menyertakan laporan latar belakang dengan mengacu pada sumber-sumber yang jelas, serta menghindari keburaman dan redundansi. *Accuracy* secara sederhana dapat dimengerti sebagai kecermatan dan ketepatan data laporan dengan kenyataan di lapangan. Keakuratan khususnya dibutuhkan pada informasi berupa fakta dan kuantitas, seperti angka, nama, tempat, atribusi, jabatan, dan waktu. *Completeness* menyangkut kelengkapan jumlah informasi relevan yang dibutuhkan untuk memahami suatu peristiwa.

Sedangkan untuk relevansi, Nordenstreng dalam McQuail (2012:223) menjelaskan relevansi sebagai suatu proses seleksi berita yang dilaksanakan menurut prinsip yang jelas dan berhubungan dengan apa yang penting bagi penerima yang dituju maupun masyarakat. Suatu informasi dianggap relevan apabila hal tersebut berguna dan menarik bagi khalayak. Singkatnya, relevansi terkait dengan 'nilai berita'. Memilih informasi yang relevan atau bernilai berita tidaklah mudah karena hal yang menarik bagi publik bisa jadi berbeda dengan hal yang para ahli anggap signifikan.

Aspek lainnya dari objektivitas yakni imparsialitas. Imparsialitas berkaitan dengan keseimbangan pilihan atau penggunaan sumber yang merepresentasikan pandangan setiap obyek pemberitaan dengan

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

pembagian porsi yang sepadan (*cover both sides*). Guna menghasilkan berita yang tidak berpihak, seorang wartawan perlu melihat suatu peristiwa secara utuh, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Selain itu, seorang wartawan juga dituntut untuk menjaga jarak, tidak berpihak khususnya saat ada dua atau lebih pandangan yang berbeda (1992:201).

Variabel imparsialitas terbagi atas dua dimensi. Dimensi pertama yaitu keseimbangan. Menurut McQuail (1992:201), keseimbangan merujuk pada pemilihan (seleksi) atau penghilangan fakta yang cenderung berat sebelah dalam menggambarkan nilai atau pandangan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

McQuail (1992:203) selanjutnya mengukur keseimbangan berdasarkan dua kriteria, yaitu *equal or proportional acces* dan *even-handed evaluation. Equal or proportional acces* memaksudkan pemberian porsi pemberitaan yang sama dan proporsional bagi setiap aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa yang hendak diberitakan (*cover both sides*). Sedangkan *even-handed evaluation* mengacu pada penilaian yang berimbang bagi setiap aktor yang diberitakan, baik penilaian positif maupun negatif.

Lalu, dimensi berikutnya yakni netralitas. Westerstahl dalam McQuail (1992:201) menyatakan, kenetralan atau *neutral presentation* menyiratkan bahwa seorang wartawan melaporkan fakta tanpa perlu mengidentifikasi atau menolak suatu subjek dalam laporannya. Alhasil seorang wartawan bersikap netral dalam arti menyajikan suatu berita

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

seutuhnya dan tidak memberikan komentar apa pun yang memungkinkan terjadinya keberpihakan. Terkait penyajian berita yang netral, ada dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu *non-evaluative* dan *non-sensational*.

Perbedaan dimensi-dimensi yang menjadi komponen dari konsep objektivitas dapat disimpulkan pada tabel berikut. Dimensi kebenaran dan netralitas merujuk pada bentuk penyajian. Sedangkan dimensi relevansi dan keseimbangan lebih mengacu kepada seleksi berita.

Tabel 2.2 Dimensi *News Assesment*

	Cognitive	Evaluative
Presentation	Truth	Neutrality
Selection	Relevance	Balance

Sumber: McQuail, 1992:202

Untuk memperdalam pemahaman mengenai komponen-komponen yang membangun konsep objektivitas, Siahaan (2001:69) kembali memperjelas konsep tersebut ke dalam skema berikut ini.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Skema 2.2 Konsep objektivitas pemberitaan J. Westerstahl yang telah dirinci lebih lanjut oleh Denis McQuail

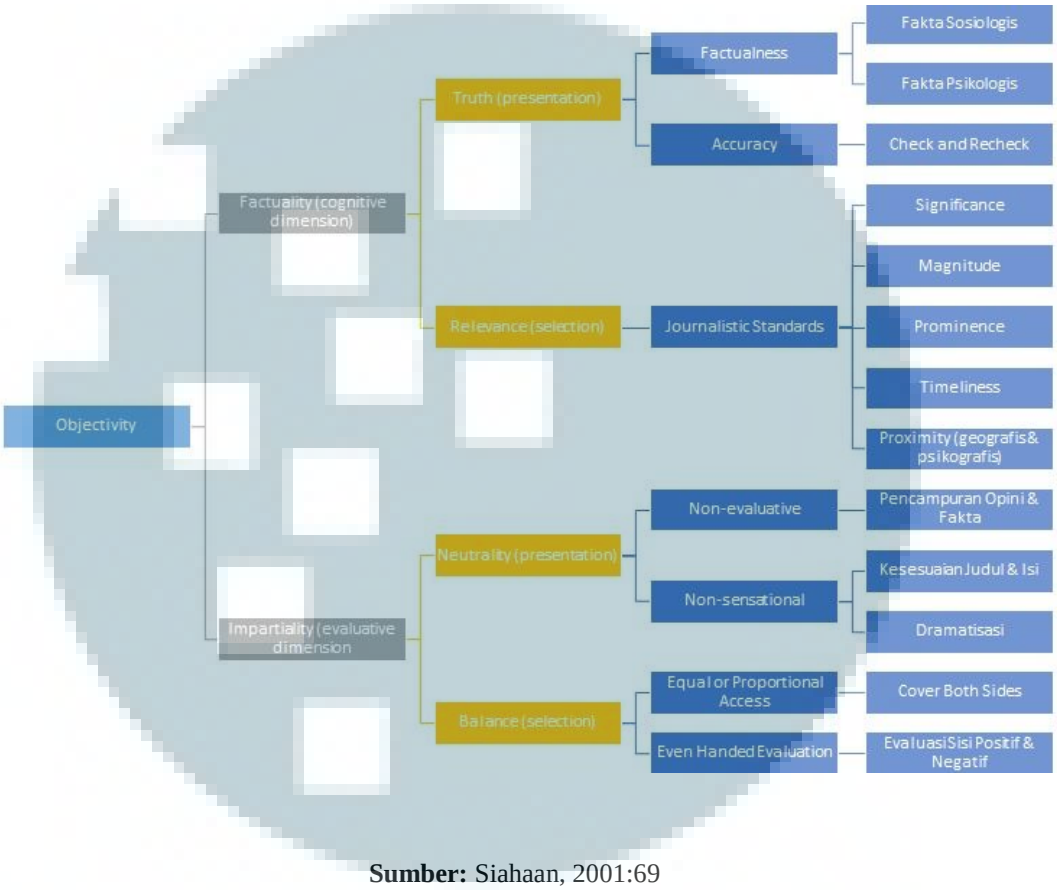

Sumber: Siahaan, 2001:69

2.2.3 Media Massa

Media massa sebagai jembatan utama dalam komunikasi massa dirancang dengan kemampuan untuk menjangkau banyak orang (2012:61). Lembaga media massa dengan para jurnalis, presenter, produser, dan *entertainer* yang bekerja di media berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi massa tersebut. Dengan kemampuan yang dimiliki media itu, pesan dapat diterima sebanyak mungkin orang secara efektif dalam waktu yang serempak.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Komunikasi yang terjadi di media massa bersifat satu arah dan tidak personal. Meski demikian, media massa memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi khalayak massa. Mengutip Muslich (2008) dalam sebuah jurnal bahasa dan seni berjudul "Kekuasaan Media Massa Mengonstruksi Realitas", tugas dan fungsi media massa dapat dipahami dengan dua pandangan yang berbeda. Menurut pandangan positivisme, media massa memiliki tugas utama sebagai alat penyalur pesan yang menyampaikan suatu peristiwa sesuai dengan realitas sebenarnya. Media massa dianggap sebagai alat yang netral. Berbeda halnya dengan pandangan positivisme, kaum konstruktivisme menilai bahwa media massa tidak hanya berperan sebagai penyalur pesan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang mengonstruksi pesan dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.

Namun, secara umum media massa memiliki lima fungsi utama sebagaimana dinyatakan oleh Bungin (2008:79). Media massa memiliki fungsi pengawasan (*surveillance*), *social learning*, penyampaian informasi, transformasi budaya, dan menghibur. Sebagai pengawas, media massa berperan dalam mengawasi aktivitas masyarakat dan khususnya pemerintah dalam kehidupan sosial sehari-hari. Media juga berperan dalam memberikan konten informasi yang mendidik atau menambah pengetahuan masyarakat. Meski memang media utamanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada khalayak, media juga berfungsi

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

dalam membawa perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Dan tidak ketinggalan, media juga memiliki fungsi untuk menghibur.

Selanjutnya, media dibagi atas beberapa bentuk, yakni media cetak, media elektronik, dan media daring. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik mencakup radio dan televisi. Kemudian, media daring sebagai media baru muncul melengkapi media-media yang sebelumnya. Media daring merupakan media yang berbasis internet, seperti portal berita *online*, situs jejaring sosial, dan sebagainya. Masing-masing media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.

2.2.3.1 Media Daring sebagai Produk Media Baru

Pada umumnya, kebanyakan orang mengidentifikasi media baru hanya terbatas pada penggunaan komputer dalam pendistribusian informasi dan menjadi alat peraga, ketimbang mendefinisikannya sebagai alat produksi informasi tersebut. Akan tetapi, Manovich dalam Hassan dan Thomas (2006:6) mendefinisikan media baru sebagai berikut.

> *New media – graphics, moving images, sounds, shapes, spaces, and texts that have become computable; that is, they comprise simply another set of computer data.*

Pernyataan Manovich tersebut telah memperluas pemahaman umum mengenai definisi media baru. Pernyataannya menyiratkan bahwa media baru merupakan komputerisasi dari proses produksi, distribusi informasi, dan komunikasi.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Pada awal 1990-an, revolusi di bidang teknologi komunikasi akhirnya melahirkan suatu media baru yang ada setelah media-media tradisional pendahulunya, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Kelahiran media baru ini ditandai dengan kemunculan internet.

McQuail (2000:127) kemudian menjelaskan hal-hal yang membedakan media baru dengan media lama dilihat dari kacamata penggunanya. Yang pertama, derajat interaktivitas pengguna media baru dilihat dari respon terhadap pengirim pesan lebih tinggi dan fleksibel dibandingkan di media lama. Kedua, derajat sosialisasi pengguna yang lebih tinggi di media baru. Hal ini berbeda dengan derajat sosialisasi di media massa yang lebih bersifat individual dan bukan interaksi langsung. Perbedaan yang ketiga yaitu derajat kebebasan dalam penggunaan media baru yang lebih tinggi karena pengguna memiliki kuasa untuk mengontrol isi medianya sendiri secara independen. Keempat, media baru menyediakan derajat kesenangan yang tinggi karena media mampu menyediakan hiburan sesuai keinginan pengguna sendiri. Dan hal yang terakhir, derajat privasi yang tinggi untuk pengguna media baru karena mereka bebas menampilkan konten apapun di internet.

McQuail (2000:125) kemudian melihat bahwa setidaknya ada tiga masalah utama tentang media baru, yaitu sulitnya menempatkan media baru terkait masalah kepemilikan dan

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

kekuasaan karena isi dan arus informasi masih dikontrol; adanya anggapan bahwa media baru terlalu individualistik sehingga akan melakukan disintegrasi terhadap kesatuan sosial masyarakat; dan adanya anggapan bahwa media dapat membuat perubahan sosial serta ekonomi yang tidak menjamin terkontrolnya pesan.

Media internet ini berkembang pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari pertambahan jumlah media daring, khususnya yang berfokus pada media berita, dari tahun ke tahun.

2.2.3.2 Jurnalisme Daring

Penggunaan internet di Indonesia telah berkembang sejak awal 1990-an. Saat itu, media baru ini berperan dalam aksi para aktivis pro demokrasi dan kelompok oposisi dari kalangan kelas menengah untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Sebagaimana dilansir dari Sen dan Hill (2007:194), internet digunakan untuk menyiasati ketatnya penyensoran media penyiaran. Para mahasiswa juga menggunakan internet untuk mengatur rencana dan mengukur dukungan internasional terkait demokrasi nasional.

Belakangan, mahasiswa-mahasiswa ini pun menduduki kantor parlemen. Bahkan, mereka berhasil mempublikasikan berita daring saat para tentara justru sedang memperkuat perimeter. Hal itu pun berhasil menarik dukungan besar dari masyarakat hingga akhirnya rezim Soeharto berhasil diruntuhkan.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Dalam konteks tersebut, internet sebagai media baru yang relatif aman dari sensor digunakan sebagai alat untuk mengkoordinasi partisipasi politik masyarakat. Media ini memiliki kekuatan dalam memobilisasi opini publik. Tujuannya untuk menekan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, media baru membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan internet ini, lahirlah peradaban masyarakat informasi yang berbasis teknologi atau akrab disebut *information society*. Kebutuhan yang tinggi akan informasi mendorong peningkatan jumlah pengguna internet. Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi per 8 Mei 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang dan menempati peringkat kedelapan tertinggi di dunia. Jumlah tersebut pun terus bertambah dari tahun ke tahun.

Kemajuan pesat internet berpengaruh besar pada sektor media massa dan jurnalistik. Jurnalisme daring sebagai generasi terbaru setelah jurnalisme tradisional menawarkan beragam fitur dan karakteristik yang memungkinkan sebuah berita dapat tersebar dengan cepat, tanpa adanya batasan waktu maupun ruang. Dengan internet, sebuah berita dapat diunggah ke laman media berita dan

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

dibaca oleh orang-orang di seluruh belahan dunia dalam hitungan detik.

Beberapa ahli mempunyai sebutan yang berbeda bagi jurnalisme daring ini. Pavlik (2001) menyebut jurnalisme daring sebagai *contextualized journalism*. Dalam hal ini, Pavlik melihat tiga fitur komunikasi yang dimiliki dalam jurnalisme tipe ini, yaitu berupa kemampuan multimedia berdasarkan *platform digital*, kualitas interaktif komunikasi daring, dan *customizable features.*

Selanjutnya, Ward (2002) memaparkan enam karakteristik jurnalisme daring yang membedakannya dari jurnalisme media konvensional. Karakteristik itu di antara adalah *immediacy, multiple pagination, multimedia, flexibility delivery platform, archiving*, dan *relationship with reader.*

Adapun *immediacy* berkaitan dengan unsur kesegeraan dalam menyampaikan sebuah berita, bahkan dalam hitungan detik. Didukung dengan karakteristik *multiple pagination,* satu topik berita dapat dimuat dalam banyak halaman, terkait satu sama lain, ataupun dibuka secara tersendiri. Kemampuan *multimedia* dari jurnalisme daring juga memungkinkan sebuah berita disajikan dengan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis lainnya. Tidak hanya itu, *flexibility delivery platform* juga memungkinkan seorang wartawan untuk menulis berita kapan saja dan di mana saja. Dalam hal pengarsipan, jurnalisme daring juga

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

memungkinkan sebuah berita dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Terakhir, terdapat pula *relationship with readers* atau interaksi antara media dengan pembaca yang dimungkinkan dengan forum komentar yang disediakan.

Adapun perkembangan yang cepat dari teknologi media dengan kemampuan konvergensinya akan berdampak pada sistem kerja media massa, terutama dalam hal praktik jurnalistik. Kehadiran jurnalisme *online* sedikit banyak akan mereduksi teknik-teknik yang terdandung dalam prinsip kerja jurnalistik tradisional, seperti akurasi, objektivitas, keberimbangan, dan ketidakberpihakkan.

Faktanya, berita pada media daring memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan berita pada media tradisional, seperti media cetak dan elektronik. Terkait hal ini, Craig (2005:89-91) menjabarkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki berita daring.

Setidaknya ada empat kelemahan berita pada media daring yang Craig sebutkan. Pertama, layar komputer berukuran terbatas dan tidak mampu menyediakan informasi sebanyak yang dapat ditemukan pada satu halaman koran. Kedua, berita daring hanya bisa menampilkan video yang terbatas dengan kualitas yang tidak sebagus pada berita televisi. Ketiga, hasil penelitian menunjukkan

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

bahwa pengguna komputer cenderung menjadi tidak nyaman saat membaca tulisan yang panjang secara *online.* Keempat, layar komputer berisi teks berukuran kecil dengan cahaya lampu dari monitor. Hal ini membuat mata pembaca menjadi mudah tegang karena seakan membaca tulisan koran pada televisi.

Di sisi lain, Craig menyebutkan lima kekuatan yang dimiliki berita *online.* Kekuatan yang pertama yaitu fitur tautan yang memungkinkan pembaca untuk membaca lebih dalam tentang satu topik berita. Seorang wartawan juga dapat memperbaharui berita secara instan dan teratur. Selain itu, keterbatasan ruang memungkinkan untuk menambah unsur kedalaman reportase. Wartawan juga bisa menambahkan audio, video, dan konten *online* yang lainnya untuk memperkaya berita *online.* Selain itu, wartawan bisa menyimpan arsip berita secara *online.*

Sebagaimana terjadi pada media tradisional, masalah pelanggaran kode etik juga umum terjadi pada media daring. Seorang jurnalis dan ahli sejarah asal Amerika, Johnson, memaparkan tujuh dosa besar pers, di antaranya penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, penyerangan terhadap privasi, pembunuhan karakter, pengeksploitasian seks, meracuni pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuh dosa besar tersebut juga dapat ditemukan pada media berita daring. Untuk itu, diperlukan suatu kode etik jurnalisme daring yang dapat menjadi

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

batasan dan aturan bagi para wartawan daring agar dapat menghasilkan berita yang memiliki standar jurnalistik yang benar.

Di Indonesia, Dewan Pers baru menetapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada 2012. Tidak jauh berbeda dengan Kode Etik Jurnalistik, PPMS berisi tentang prinsip verifikasi berita, keberimbangan suatu berita, dan standar penulisan berita media siber. Standar penulisan itu mencakup tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul; tidak memuat berita berisi prasangka dan kebencian terkait SARA; tidak memuat berita yang berisi unsur diskriminatif. Di samping itu, PPMS juga mengatur soal ralat, koreksi, hak jawab, dan pencabutan berita.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori tanggung jawab sosial, sebuah media bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyediakan informasi yang mengandung faktual dan berimbang, serta menghindari segala sesuatu yang dapat diasumsikan sebagai penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama tertentu. Dalam pelaksanaannya, sebuah redaksi media penting untuk menerapkan objektivitas. Demikian pula halnya dengan media berita daring yang berideologi Islam, seperti VOA Islam, harus menerapkan objektivitas.

Selama September dan Oktober 2014, pemberitaan mengenai Ahok kerap muncul di berbagai media, terutama berkaitan dengan berita protes anti Ahok naik menjadi gubernur DKI. Dalam beberapa pemberitaan, isu etnik dan agama sering

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

digunakan untuk menyerang Ahok. Padahal, sebuah media seharusnya menjaga objektivitas. Objektivitas yang dimaksudkan mencakup dimensi faktualitas dan imparsialitas (ketidakberpihakan).

Berangkat dari pemikiran tersebut, objektivitas pemberitaan Protes Anti Ahok di media daring berideologi Islam dapat diukur dengan menggunakan teknik analisis isi kuantitatif.

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015

Skema 2.3 Kerangka pemikiran peneliti

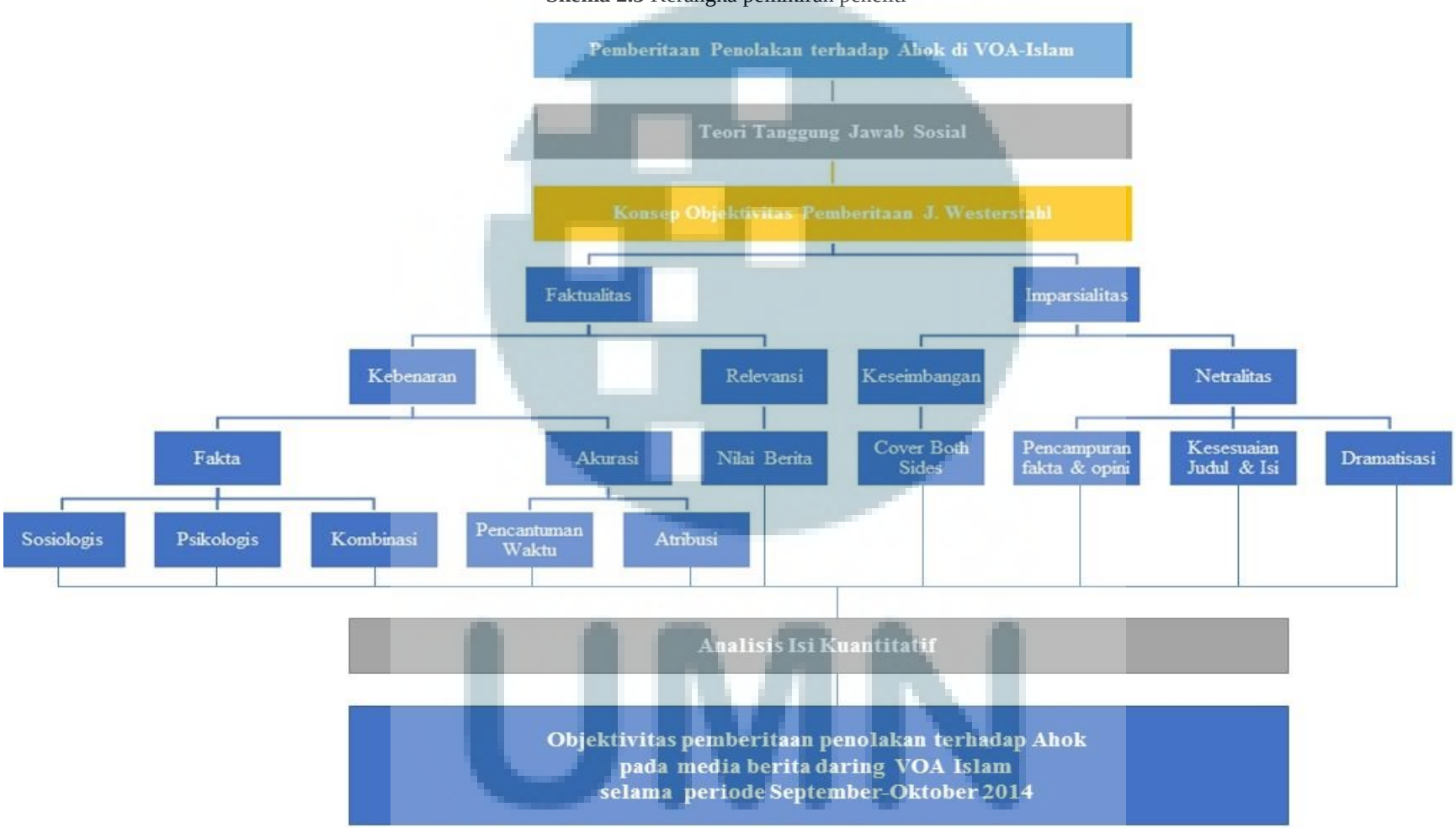

Objektivitas Pemberitaan..., Georgene Suryani, FIKOM UMN, 2015